

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, Indonesia dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang didasari atas sikap saling membangun dan mengembangkan kontribusi aktor tingkat *sub-state* dalam ruang lingkup hubungan internasional. Kerja sama ini dibentuk dengan didasari pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara yang mempunyai andil besar dalam isu global, khususnya dalam sektor lingkungan. Kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang, Indonesia dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang fokus dalam sektor lingkungan dimana adanya perencanaan pengembangan sektor melalui program *Joint Crediting Mechanism* (JCM). Kerja sama ini berbentuk kolaborasi antar kota atau yang disebut sebagai *sister city* dimana terlihat bahwa unsur diplomasi dalam hubungan antar negara tidak hanya menyentuh Pemerintah Pusat sebagai aktor utama dalam sebuah struktur negara namun juga Pemerintah Daerah.

Kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Toyama dalam skema JCM dimulai sejak tahun 2017 dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI). Namun, kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam skema JCM sebagai pola hubungan kerja sama bilateral sudah berlangsung semenjak tahun 2013. Bentuk kerja sama *sister city* ini merupakan sebuah pengembangan dimana adanya proses implementasi yang lebih efektif dengan bergerak secara bertahap pada tingkat daerah atau kawasan suatu negara. Kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Toyama dalam skema JCM ini telah mencapai suatu hasil yaitu dengan mengaplikasikan teknologi CNG pada proyek bus BRT Trans Semarang.

Proyek pengaplikasian teknologi CNG pada proyek bus BRT Trans Semarang adalah sebuah proyek dimana adanya pemasangan teknologi berbahan bakar gas yang disebut CNG pada transportasi publik Kota Semarang. Pengaplikasian CNG tersebut guna menurunkan tingkat pengeluaran emisi pada sektor transportasi Kota Semarang karena nantinya dalam proses pembakaran, emisi yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan transportasi

publik yang memakai teknologi diesel atau berbahan bakar minyak. Pelaksanaan program atau proyek ini langsung melibatkan masing-masing pihak yaitu Pemerintah Pusat masing-masing negara, Pemerintah Kota, serta adanya partisipan proyek yang bergabung dalam hal teknis pelaksanaan. Selain itu, skema pendanaan serta hal-hal administratif lainnya juga disusun dengan pembagian struktur yang jelas terkait keterlibatan kedua pihak Pemerintah Kota masing-masing negara dikarenakan kerja sama ini bersifat kolaborasi antar kota.

Kerja sama yang sudah hampir berjalan tiga tahun ini telah membuktikan bahwa adanya pengurangan emisi yang dibandingkan antara pemakaian bahan bakar gas terhadap transportasi publik dengan pemakaian bahan bakar minyak. Dengan adanya hasil penurunan emisi, kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Toyama dalam skema JCM ini akan menyusun target-target pencapaian penurunan emisi kedepannya sehingga diharapkan kerja sama ini akan terus bergerak linear dengan program-program yang dicanangkan. Terlepas dari tantangan dan hambatan yang di hadapi seperti perbedaan nilai mata uang dalam skema pendanaan proyek, proses instalasi yang memakan waktu cukup lama, serta penyediaan stasiun bahan bakar gas pun tidak menghalangi kedua Pemerintah Kota untuk tetap melanjutkan kerja sama tersebut.

Penelitian terkait kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Toyama dalam skema JCM ini memperlihatkan bahwa dalam konstelasi hubungan internasional sekarang telah terjadi banyak perubahan, khususnya dalam hal keterlibatan aktor-aktor hubungan internasional. Adanya konsep *multi-track diplomacy* menunjukkan bahwa isu-isu hubungan internasional tidak hanya dapat dipegang atau diselesaikan oleh negara sebagai aktor utama. Namun, diperlukan keterlibatan aktor-aktor lainnya yang memungkinkan penyelesaian atau pengembangan sebuah fenomena internasional dapat lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari konsep *multi-track diplomacy* mempunyai kepentingan dalam sebuah fenomena hubungan internasional termasuk dalam hubungan kerja sama antar negara. Pemerintah Daerah melalui konsep paradiplomasi mempunyai hak dan wewenang untuk mengembangkan daerahnya dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota negara lain

sebagai aplikasi dari pelaku hubungan internasional. Dalam hal ini, dapat terlihat bagaimana Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan yang besar untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Toyama sebagai pengembangan Kota Semarang sebagai *smart-city* serta menerapkan pembangunan rendah karbon di Kota Semarang. Begitu pula dengan keterlibatan Pemerintah Kota Toyama yang mempunyai kepentingan untuk melanjutkan misi pembangunan berkelanjutan sehingga isu kehancuran revolusi industri tidak menjadi hambatan bagi negara-negara industri lainnya.

Dapat disimpulkan, kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang, Indonesia dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang dalam program penerapan unsur JCM dengan pengaplikasian teknologi konverter kit CNG terhadap bus BRT Trans Semarang cukup berhasil. Terlihat dengan proses kerja sama yang bergerak linear dan konsisten serta sudah mempunyai rencana ataupun target untuk pengembangan program kerja sama tersebut kedepannya. Hal ini juga membuktikan bahwa konsep paradiplomasi di Indonesia terlihat sudah dijalankan dengan adanya beberapa kerja sama dalam bentuk *sister city* yang dijalankan di beberapa kota di Indonesia guna mendukung sektor-sektor strategis di Indonesia.

6.2 Saran

Kerja sama dalam bentuk *sister city* merupakan salah satu upaya penting untuk mengembangkan sektor-sektor sebuah kota di suatu negara serta juga mempunyai kontribusi terhadap negara dan global. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus lebih gencar untuk mempromosikan pembentukan kerja sama *sister city* ini terhadap Pemerintah Kota yang ada di Indonesia, tidak hanya kepada ibukota Provinsi atau kota-kota besar saja. Pemerintah Pusat sebagai penanggungjawab atas kegiatan Pemerintah Daerah harus lebih berusaha untuk membuat Pemerintah Kota di suatu daerah terlebih juga masyarakat daerah tersebut tertarik untuk mencoba membentuk kerja sama dengan kota di negara lain serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa masing-masing Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia harus lebih sering berkomunikasi dan berdiskusi terkait keterlibatan daerah-daerah di Indonesia

pada kancah dan konstelasi hubungan internasional. Misalnya dalam hubungan kerja sama antar negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Indonesia dapat membuat suatu program promosi disertai dengan sosialisasi yang mengedukasi pegawai daerah serta masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjalin diplomasi dengan kota di negara lain. Hal ini akan membantu masyarakat daerah-daerah di Indonesia untuk mengerti akan guna kerja sama tersebut apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi suatu daerah atau bahkan individu daerah tersebut.

Penelitian ini secara tidak langsung juga menyadarkan penulis bahwa dalam kata “hubungan internasional”, negara hanya sebagai perwakilan suatu negara saja. Untuk membuat negara dapat diterima sebagai perwakilan yang mewakili suatu negara di forum internasional, keterlibatan aktor-aktor lainnya sangat dibutuhkan, khususnya Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dapat lebih cepat dan tanggap dalam menyetuh persoalan masyarakat yang ada di suatu negara. Dan oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah jugalah yang dapat lebih bergerak secara efektif dan efisien untuk mendorong masyarakat suatu negara memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara tersebut.

